



KABUPATEN BENGKULU UTARA

SELASA, 21 JANUARI 2020

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dewan Nilai Proyek GOR Banyak Masalah

**Hasil Sidak
Komisi III**

ARGA MAKMUR - Komisi III DPRD Bengkulu Utara (BU) dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD BU Juhaili dan Ketua Komisi III Hasdiansyah melakukan sidak ke lokasi pembangunan GOR. Pembangunan senilai Rp 10,9 miliar ini menjadi sorotan karena tidak selesai sesuai kontrak awal 24 Desember 2019.

Dalam sidak ini, dewan menilai banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh kontraktor. Terutama tidak tuntasnya pekerjaan dalam waktu sesuai kontrak. Selain itu dewan juga menilai alasan kontraktor tidak selesai sesuai kontrak karena musim hujan dinilai terlalu mengada-ada. "Alasan kontraktor karena musim hujan, padahal musim hujan di akhir tahun sudah biasa, dan seharusnya proyek juga sudah selesai 24 Desember," kata Hasdiansyah.

Tidak hanya itu, dewan langsung mengecek fisik pekerjaan yang masih menemukan beberapa pertanyaan. Selain masih ditemukan fasilitas yang rusak, dewan juga sangsi dengan lantai plastik jenis interlock yang dibuat di GOR, sedangkan salah satu fungsi GOR akan dijadikan tempat bermain basket.

"Selain itu bagian bawah juga nampak hanya busa tipis. Termasuk beberapa fasilitas yang rusak seperti lampu, keran WC hingga bagian pintu yang sudah terkelupas," katanya.

Dewan mengundang Dinas Dispora selaku pemilik pekerjaan dan kontraktor pelaksana untuk hadir dalam Rapat Dengan Penda-pat (RDP) dengan DPRD hari ini. Ia juga meminta kedua pihak membawa kontrak kerja. "Kami melihat banyak kejanggalan, makanya kita minta kontrak dibawa. Kita bedah nanti apakah memang semuanya sudah sesuai kontrak," tegas Hasdiansyah.

Pelaksana lapangan dari PT

Persada Bakti Mandiri (PBM), Ir. Ramadan menyatakan semua pekerjaan sudah sesuai kontrak. Hanya saja masih ada beberapa finishing yang akan dilakukan hingga akhir masa penambahan waktu 15 hari. "Semuanya sudah sesuai dengan kontrak. Kita siap jelaskan pada DPRD," tegasnya.

Uang Jaminan

Kontraktor sudah melakukan pencairan dana 95 persen atau sekitar Rp 10,4 miliar. Jumlah tersebut diakui Ramadan sesuai dengan jumlah penghitungan fisik terakhir yang dilakukan konsultan, PT PBM dan Dispora. "Jadi saat ini masih ada sisa uang 5 persen dari kontrak yang belum kami cairkan karena pembangunan belum 100 persen," katanya.

Ramadan mengaku PT. PBM tidak menempatkan uang jaminan pasca perpanjangan kontrak dengan konsekuensi denda. "Iya, kami tidak menempatkan jaminan pelaksanaan," ujarnya. (qia)